



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIS SUHARYANTA**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **61844**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.390.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 470.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/290 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/270 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **850.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 333.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.4 G AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 433.000.000
6. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **176.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	61.287.602
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.477.287.602
III. HUTANG	Rp.	240.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.237.287.602

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.